

JURNAL PENELITIAN MANAJEMEN  
**MANAJERIAL**

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA SELAMA PANDEMI

**Yoga Aditya Pambudi**

*Kementerian Keuangan*

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> <i>Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Selama Pandemi Act no. xx of 2022 Anggaran, Realisasi, Penyerapan, Kementerian/Lembaga, Pandemi Covid.</i></p>	<p><i>In March 2020, the government officially announced that the COVID-19 pandemic had penetrated Indonesia. The pandemic that occurred also affected the public economic sector. Government offices implement a work from home (WFH) system, thereby automatically suppressing the need for shopping for office goods. In addition, many procurement processes have been hampered, even halted as a result of the COVID-19 pandemic. Many of the budgets previously earmarked for the activities of Ministries/Agencies have been reduced and diverted to activities to handle the COVID-19 pandemic. This affects the realization of budget absorption during the covid pandemic at Ministries/Agencies. The realization of budget absorption at Ministries/Agencies is categorized into 3 (three) levels, namely: (1) low absorption rate if it is less than 90%; (2) moderate absorption rate if it is between 90% to 94.99%; and (3) high absorption rate if the realization of budget absorption is more than 95%.</i></p>
<p>*Corresponding author E-mail addresses: <a href="mailto:piikwalik@gmail.com">piikwalik@gmail.com</a> <a href="http://repo.jayabaya.ac.id/xxxx/">http://repo.jayabaya.ac.id/xxxx/</a> (Link Repository Artikel)</p> <p>Jurnal Penelitian Manajemen Volume xx Nomor x Terintegrasi : <i>Repository Universitas Jayabaya</i> <a href="http://repositori.jayabaya.ac.id/">http://repositori.jayabaya.ac.id/</a></p>	<p>Pada bulan maret tahun 2020, pemerintah resmi mengumumkan bahwa pandemi covid-19 telah merambah Indonesia. Pandemi yang terjadi turut mempengaruhi sektor ekonomi public. Kantor-kantor pemerintahan menerapkan sistem <i>work from home</i> (WFH), sehingga secara otomatis menekan kebutuhan belanja barang keperluan perkantoran. Selain itu banyak proses pengadaan yang terhambat, bahkan terhenti sebagai akibat pandemic covid ini. Anggaran yang sebelumnya diperuntukkan guna kegiatan Kementerian/Lembaga banyak yang dikurangi dan dialihkan pada kegiatan-kegiatan penanganan pandemic covid. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran selama pandemi covid pada Kementerian/Lembaga. Realisasi penyerapan anggaran</p>

pada Kementerian/Lembaga dikategorikan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (1) tingkat penyerapan rendah apabila kurang dari 90%; (2) tingkat penyerapan sedang apabila antara 90% sampai dengan 94,99%; dan (3) tingkat penyerapan tinggi apabila realisasi penyerapan anggaran lebih dari 95%.

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung semenjak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini ikut berpengaruh dalam semua lini kehidupan, Aspek yang paling terdampak salah satunya adalah sektor ekonomi. Pandemi yang berlangsung hampir terjadi di seluruh bagian dunia mengacaukan kehidupan ekonomi, baik ekonomi di sektor privat (kehidupan ekonomi individu masyarakat) maupun ekonomi di sektor publik (pemerintahan). Banyak proses pengadaan yang terhambat dan bahkan sebagian harus dibatalkan. Pengadaan barang dan belanja modal yang telah direncanakan direview kembali berdasarkan skala prioritas. Untuk belanja barang dan belanja modal yang tidak mendesak terpaksa harus ditunda bahkan dibatalkan, untuk kemudian dialihkan untuk penanganan pandemi covid yang bersifat darurat dan sangat mendesak. Dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran harus berdsarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku serta memperhatikan rencana awal dari tujuan anggaran tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengertian anggaran dan berbagai fungsinya;
2. Bagaimana siklus realisasi anggaran;
3. Bagaimana realisasi tingkat penyerapan anggaran

Kementerian/Lembaga pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19); dan

4. Bagaimana realisasi tingkat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2020 (selama pandemi covid-19).

## METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia dan berfokus pada tingkat realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.
2. Bahan dan Alat Penelitian  
Sumber Data  
Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit oleh BPK.  
Populasi dan Sampel  
Populasi penelitian ini adalah seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia
3. Metode Analisis Data  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode penelitian terhadap status

sekelompok orang, suatu objek, kondisi, atau system konseptual, serta fenomena yang terjadi.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran secara umum adalah suatu rencana yang dibuat secara sistematis berupa angka dan dinyatakan dalam unit moneter (uang) meliputi semua kegiatan yang dijalankan oleh suatu perusahaan maupun organisasi dalam jangka waktu/periode tertentu sebagai rencana yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Suatu instansi maupun perusahaan harus memiliki anggaran guna menjalankan proses bisnisnya. Tanpa adanya anggaran tentunya proses bisnis tidak dapat berjalan lancar, bahkan bisa terhenti. Termasuk juga proses bisnis dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu setiap instansi pasti dibekali dengan anggaran. Anggaran bagi instansi biasanya disusun tahunan, dan dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Anggaran memiliki berbagai macam fungsi bagi organisasi maupun bagi perusahaan. Diantaranya:

#### 1. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran menjadi patokan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan perusahaan/organisasi.

#### 2. Fungsi Perencanaan

Anggaran dapat memberikan gambaran dan ilustrasi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi/perusahaan, sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi lebih terarah sesuai dengan perencanaan awal perusahaan/organisasi.

#### 3. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan koordinasi dalam instansi pemerintah. Apalagi untuk anggaran-anggaran tertentu yang bersinggungan antar instansi. Tentunya diperlukan komunikasi dan koordinasi agar tujuan dapat dicapai Bersama.

#### 4. Fungsi Penilaian Kinerja

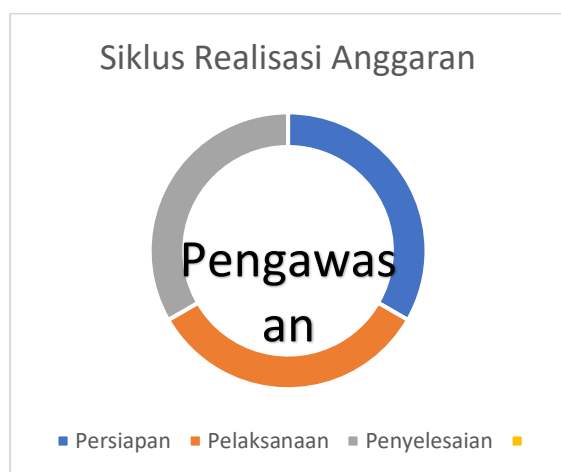
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu organisasi. Penilaian dimaksud dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran yang ada. Selain itu dapat pula dilihat seberapa efektif dan efisien suatu organisasi/instansi dalam merencanakan dan menggunakan anggaran yang dimilikinya.

#### 5. Fungsi Kebijakan Fiskal

Pada sektor pemerintahan public anggaran dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian, menstabilkan perekonomian, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Siklus Realisasi Anggaran

Siklus realisasi anggaran pada sektor public menurut Indra Bastian (2010:191) dimulai dari tahapan (1) pencairan anggaran (pengeluaran); (2) realisasi pendapatan; dan (3) Pelaksanaan. Tahapan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 kegiatan utama yaitu: Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyelesaian yang tentunya harus diimbangi dengan pengendalian dan pengawasan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Pencairan anggaran (pengeluaran), tahapan ini meliputi kegiatan prosedural membuat permintaan kas anggaran; tahap proses pelaksanaan meliputi kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, proses akuntansi, penyelesaian proses pencatatan barang dan modal, serta pelaporan kegiatan akuntansi.
2. Realisasi pendapatan, yaitu dimulai dengan persiapan yang terdiri dari kegiatan mengkalkulasi potensi dan

membuat peraturan dalam prosedur serta formulir; tahap proses pelaksanaan yaitu berawal dari kegiatan penagihan dan pengumpulan dokumen pendapatan; dan tahap proses penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta penerapan sanksi dan insentif.

3. Pelaksanaan program, tahapan dimulai dengan mempersiapkan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan melaksanakan pekerjaan, sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.

## Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga

Realisasi anggaran dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta harus selaras dengan rencana awal organisasi. Namun dalam kenyataannya proses realisasi anggaran dibutuhkan strategi dan kemampuan teknis agar realisasi penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Kategori pemeringkatan realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga diatur dalam PMK no. 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Kategori peringkat

realisasi penyerapan anggaran dimaksud yaitu:

- Kategori realisasi penyerapan anggaran tinggi  
Kategori ini diperuntukkan bagi instansi dengan realisasi penyerapan anggaran lebih dari atau sama dengan 95% dari anggaran;
- Kategori realisasi penyerapan anggaran sedang  
Kategori ini diperuntukkan bagi instansi dengan realisasi penyerapan anggaran 90% sampai dengan 94,99% dari anggaran;
- Kategori realisasi penyerapan anggaran rendah  
Kategori ini diperuntukkan bagi instansi dengan realisasi penyerapan anggaran kurang dari 90%.

Realisasi penyerapan anggaran pada seluruh Kementerian/Lembaga pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid) adalah sebagai berikut:

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2019					
NO	KODE BA ESELON I	URAIAN KODE BA ESELON I	APBN	REALISASI	%
1	1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	958.397.258.000	897.282.909.309	93,58%
2	2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.739.310.147.000	4.714.765.127.133	82,15%
3	4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.953.072.738.000	3.730.778.875.248	126,34%
4	5	MAHKAMAH AGUNG	8.276.467.475.000	8.871.345.071.033	107,19%
5	6	MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA	4.948.271.982.000	6.835.617.383.798	138,34%
6	7	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.773.189.750.000	2.445.252.454.821	137,93%
7	10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.172.970.626.000	3.297.046.701.392	103,91%
8	11	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.911.758.863.000	7.716.627.310.799	97,53%
9	12	KEMENTERIAN PERTAHANAN	108.357.912.989.000	115.351.666.000.441	106,49%
10	13	KEMENTERIAN KUKUH DAN HAK ASASI MANUSIA RI	13.305.871.866.000	13.774.396.008.362	103,52%
11	15	KEMENTERIAN KEUANGAN	45.156.382.040.000	39.546.053.068.399	87,58%
12	18	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.686.516.683.000	19.454.252.887.561	89,73%
13	19	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.593.324.559.000	3.765.026.653.538	104,83%
14	20	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.989.416.415.000	4.764.913.690.307	95,50%
15	22	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	41.854.917.054.000	38.695.691.976.332	92,43%
16	23	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	35.993.067.934.000	38.494.699.999.332	107,23%
17	24	KEMENTERIAN KESEHATAN	38.746.540.744.000	67.279.328.079.900	174,42%
18	25	KEMENTERIAN AGAMA	62.966.722.163.000	63.946.389.726.213	103,15%
19	26	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5.785.135.777.000	5.288.331.359.479	91,41%
20	27	KEMENTERIAN SOSIAL	58.906.458.379.000	57.726.645.452.081	97,83%
21	29	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.076.472.682.000	8.843.040.517.179	97,43%
22	33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	110.731.599.735.000	100.557.499.619.109	90,81%
23	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	281.470.604.000	269.109.796.329	95,61%
24	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.168.403.000	427.700.998.822	103,27%
25	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	342.898.144.000	279.023.455.431	81,37%
26	40	KEMENTERIAN PARWISATA	3.831.062.805.000	3.632.840.841.308	94,83%
27	41	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	208.269.902.000	202.923.377.661	97,24%
28	42	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	41.264.106.844.000	45.499.009.030.136	110,26%
29	44	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	961.432.185.000	904.735.506.509	94,10%
30	47	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN A	493.036.794.000	490.206.212.291	97,28%
31	48	KEMENTERIAN PENYAYAGULANGAN APARATUR NEGARA DAN REFORMA	323.335.887.000	313.618.680.764	96,99%
32	50	BADAN INTELEKSI NEGARA	5.353.428.881.000	5.496.675.771.095	102,68%
33	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.308.100.095.000	2.270.771.765.897	98,38%
34	52	BADAN KEAMANAN NASIONAL	42.930.420.000	43.291.297.447	100,86%
35	54	KOMISI NASIONAL	5.211.787.965.000	4.974.323.780	95,44%
36	55	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.781.109.088.000	1.980.198.695.165	111,19%
37	56	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	9.669.251.145.000	8.959.236.849.792	92,65%
38	59	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.380.355.088.000	6.498.885.970.314	120,79%
39	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	86.187.801.241.000	98.191.072.462.088	113,93%
40	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.970.195.546.000	2.028.648.053.570	102,97%
41	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	201.378.786.000	205.679.961.120	102,14%
42	65	BADAN KODORIUM PENANAMAN MODAL	616.040.891.000	597.118.142.460	96,93%
43	66	BADAN NASROTKA NASIONAL	1.299.378.125.000	1.315.667.293.447	100,86%
44	67	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSPORTASI	4.325.623.104.000	5.165.837.344.165	119,42%
45	68	BADAN KEPENDULUNGAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.791.611.729.000	3.538.241.106.438	93,32%
46	74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	85.794.908.000	97.586.419.621	113,71%
47	75	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEMSI	1.754.228.195.000	2.408.284.219.974	137,28%
48	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	18.104.139.070.000	17.432.278.990.495	96,29%
49	77	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	539.645.401.000	519.882.725.310	96,34%
50	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	180.362.223.000	195.685.169.459	108,50%
51	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.424.079.428.000	1.431.828.441.271	100,54%
52	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	888.905.286.000	976.335.669.773	109,84%
53	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.372.693.070.000	1.560.963.664.572	113,72%
54	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARiksa NASIONAL	792.864.792.000	790.286.547.322	100,43%
55	83	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	727.737.635.000	675.009.572.911	92,75%
56	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	231.619.639.000	241.520.103.214	104,27%
57	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	176.708.972.000	173.308.378.085	98,08%
58	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	319.338.715.000	338.792.939.594	106,09%
59	87	ARSEP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	290.463.632.000	309.389.633.258	106,50%
60	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	625.144.810.000	614.789.701.800	98,34%
61	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.431.753.914.000	1.592.578.298.133	111,23%
62	90	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.293.722.393.000	3.246.524.101.571	98,57%
63	92	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.591.091.970.000	2.051.207.494.609	128,90%
64	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	813.448.205.000	894.360.496.200	109,95%
65	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.087.118.025.000	1.037.524.462.836	95,47%
66	100	KOMISI YUDISIAL RI	120.405.477.000	123.260.146.355	102,39%
67	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	619.425.671.000	8.078.301.770.792	1304,42%
68	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	317.971.678.000	312.761.693.658	98,36%
69	106	LEMBAGA KEBLIKARAN PENGADAAN BARANG-JASA PEMERINTAH	213.102.107.000	232.670.388.086	109,18%
70	107	BADAN SAR NASIONAL	1.386.896.526.000	1.583.041.983.088	100,11%
71	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	131.177.030.000	134.810.868.491	102,77%
72	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABADU	218.231.445.000	181.124.086.287	83,00%
73	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	190.718.755.000	161.415.619.730	84,64%
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	193.968.340.000	178.487.785.704	92,02%
75	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABU	1.820.890.963.000	1.965.297.279.198	108,00%
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	699.598.337.000	644.045.214.838	92,06%
77	114	SEKRETARIAT KABINET	798.072.365.000	387.471.129.222	48,55%
78	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	8.628.733.903.000	6.403.438.094.494	74,21%
79	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	994.120.111.000	903.129.725.254	90,85%
80	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	951.021.692.000	958.650.092.158	100,80%
81	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABU	221.429.833.000	187.330.725.253	84,60%
82	119	BADAN KEAMANAN LAUT	447.418.980.000	424.130.206.698	94,80%
83	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITRAN	254.166.852.000	251.041.375.137	98,77%
84	121	BADAN EKONOMI KREATIF	657.151.214.000	585.577.623.225	89,13%
85	122	BADAN PEMBINAAN TEKNOLOGI PANCASILA	141.403.862.029	141.403.862.029	100,00%
86	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	778.893.674.484.000	622.886.657.892.672	79,97%

Sumber: LKPP 2019

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid) terdapat 12 Kementerian/Lembaga dengan predikat penyerapan anggaran rendah, 13 Kementerian/Lembaga dengan predikat realisasi penyerapan anggaran sedang,





## SARAN

Guna meningkatkan kualitas realisasi penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga, strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Lebih selektif dalam perencanaan anggaran  
Melalui perencanaan anggaran yang lebih selektif, diharapkan akan mengurangi kemungkinan anggaran tersebut tidak terserap (terrealisasi). Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga.
2. Melonggarkan kebijakan revisi anggaran  
Revisi anggaran ini dimaksudkan agar Kementerian/Lembaga lebih fleksibel dalam penggunaan anggarannya. Sehingga apabila ada anggaran yang kemungkinan besar tidak terealisasi (tidak dapat terserap), Kementerian/Lembaga dapat segera melakukan revisi anggaran ke output/kegiatan yang lebih mendesak dan lebih penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penyusunan APBN (2013).  
Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- PMK No. 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga  
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Indra Bastian (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta

<https://djpb.kemenkeu.go.id/port al/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>